**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA RANGGAWULUNG DALAM
MENGOPTIMALKAN PAD DESA CURUGBITUNG KABUPATEN LEBAK**

Oleh :

Riyan Satrio Anggoro¹⁾, Arif Nugroho²⁾, Muhammad Taufik Harsana³⁾,
Lutfi⁴⁾

satrioriyan86@gmail.com

Prodi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten ^{1,2,3,4)}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ranggawulung dalam mengoptimalkan PAD Desa Curugbitung Kabupaten Lebak. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Curugbitung Kabupaten Lebak selama 3 (tiga) bulan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Simpulan hasil penelitian yaitu penerapan enam prinsip pengelolaan BUMDes belum dilaksanakan secara optimal, BUMDes Ranggawulung masih memiliki banyak ruang yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Kurangnya partisipasi anggota BUMDes Ranggawulung menyebabkan beberapa pekerjaan tidak dilaksanakan, tidak adanya dokumen administrasi laporan sebagai pertanggungjawaban kepada pengguna informasi. Kurang optimalnya promosi wisata melalui media sosial. Meski memiliki banyak sisi yang harus diperbaiki, BUMDes Ranggawulung tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan penerapan enam prinsip pengelolaan BUMDes agar lebih profesional dan meningkatkan standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan BUMDes.

Kata kunci: Pengelolaan, BUMDes, Pendapatan Asli Desa.

ABSTRACT

This research aims to understand how the management of the Badan Usaha Milik Desa Ranggawulung in optimizes the Village Original Revenue in Curugbitung Village, Lebak Regency. The research was conducted in Curugbitung Village, Lebak Regency, over a period of three months. The study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included triangulation of techniques and sources. The data analysis technique used consisted of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The conclusion of the study indicates that the implementation of the six principles of BUMDes management has not been carried out optimally. BUMDes Ranggawulung still has many areas that need further improvement. The lack of participation from BUMDes Ranggawulung members has resulted in some tasks not being carried out. There is also an absence of administrative documentation as accountability to information users. The promotion of tourism through social media is also suboptimal.

Despite these shortcomings, BUMDes Ranggawulung remains committed to continuously improving and enhancing the implementation of the six principles of BUMDes management in order to be more professional and to raise the standard of BUMDes management.

Keywords: Management, BUMDes, Village Original Revenue.

PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara terbentuk, struktur sosial sejenis desa telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting (Widjaja, 2010). Pemerintah Desa memiliki sumber pendanaan dari alokasi APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah, sumbangan, adapun sumber pendanaan desa dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (Suparno, 2023). jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana tambahan untuk pengelolaan dan pembiayaan pembangunan, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan program lain (UTSBerita, 2022).

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan dari pemanfaatan potensi dan aset yang dimiliki desa, PADes dapat diperoleh dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain PADes yang sah, jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana tambahan untuk pengelolaan dan pembiayaan pembangunan, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan program lain (UTSBerita, 2022).

Strategi untuk memudahkan desa mendapatkan sumber PADes salah satunya peran pemerintah melalui kebijakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Desa disarankan memiliki suatu Badan Usaha Milik Desa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengelola sumberdaya desa

yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang harus berpihak kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial dan lembaga komersial (*commercial institution*) untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pangsa pasar (Departemen Pendidikan & PKDSP, 2007).

Perkembangan BUMDes di Indonesia beberapa tahun belakangan sangat pesat, berdasarkan data yang di muat dari situs kemendes.go.id pada akhir 2024 jumlah BUMDes mencapai 60.650 dengan rincian 54.778 BUMDes mandiri dan 5.872 BUMDes Bersama, hal tersebut terdapat peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2020 yang masih berjumlah 51.134 BUMDes.

Perkembangan BUMDes di Kabupaten Lebak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada pertengahan 2024 DPMD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 118 BUMDes aktif. Permodalan yang digunakan oleh BUMDes sangat bervariasi sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes itu sendiri. Berikut 5 BUMDes yang memiliki permodalan terbesar di Kabupaten Lebak:

Tabel 1
lima BUMDes dengan permodalan terbesar di Kabupaten Lebak

Nama BUMDes	Usaha	Jumlah Modal
BUM Desa Ranggawulung	Wisata alam	Rp. 1.788.500.000
BUM Desa Cikatapis	Bengkel Las, Rental Mobil	Rp. 1.503.477.000
BUM Desa Berani Jaya	Agen Gas LPG, <i>Waterboom</i>	Rp. 1.423.216.000
BUM Desa Kalimaya	Pengewaan Gedung, peralatan pesta, dll.	Rp. 1.275.087.500
BUM Desa Damarjati	Fotocopy, Brilink, kolam renang	Rp. 1.227.253.800

Sumber: DPMD Kabupaten Lebak, 2024

BUMDes Ranggawulung Desa Curugbitung merupakan BUMDes dengan permodalan terbesar di Kabupaten Lebak dengan total modal per tahun 2024 sebesar Rp 1.788.5000.000 yang bersumber dari Dana Desa

dan berbagai sumber bantuan seperti Kemendesa, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak untuk satu jenis usaha yaitu mengelola wisata alam Ranggawulung. Berbeda dengan keempat BUMDesalain meski jumlah modal termasuk besar namun digunakan untuk beberapa jenis usaha sehingga pendapatan BUMDesa tidak hanya bersumber dari satu pintu, namun hal ini kembali lagi pada potensi yang ada di desa dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Namun dengan jumlah modal yang sangat besar, ternyata BUMDes Ranggawulung belum berdampak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa Curugbitung, mengingat PADes Curugbitung hanya bersumber dari BUMDes.

Tabel 2 PADes Curugbitung

Tahun	PAD Curugbitung	Realisasi APBDes
2021	2.000.000	Rp 1.358.042.712
2022	6.000.000	Rp 1.337.824.529
2023	7.200.000	Rp 2.111.234.367

Sumber: Pemerintah Desa Curugbitung, 2024

Meski PADes selalu mengalami kenaikan setiap tahun namun hal ini belum berbanding lurus dengan modal yang dialokasikan untuk membangun dan mengelola BUMDes. Bahkan Rasio PADes Curugbitung 2021-2023 tidak mencapai 0,5% dari realisasi APBDes yang telah dianggarkan.

Hasil observasi peneliti menemukan beberapa masalah pada pengelolaan BUMDes Ranggawulung diantaranya adalah menurunnya partisipasi anggota BUMDes Ranggawulung, padahal awal pembentukan BUMDes memiliki 15 anggota namun saat penelitian dilakukan hanya tersisa 5 anggota sehingga kinerja BUMDes dalam menjalankan usaha tidak dapat maksimal. Kedua kurangnya partisipasi masyarakat Curugbitung dalam mengelola BUMDes, tidak lebih 10 pelaku UMKM yang ada di wisata Ranggawulung bahkan pada hari biasa hanya terdapat 2 UMKM yang tetap beroperasi atau berjualan. Ketiga, kurangnya promosi wisata terutama secara *online*, dapat dilihat dari akun Instagram “wisata alam ranggawulung” tidak aktif mempromosikan dan menginformasikan

tentang wisata Ranggawulung, bahkan jarak waktu antar postingan begitu jauh. Mengingat pendapatan dari retribusi tiket pengunjung merupakan pendapatan terbesar dari BUMDes Ranggawulung. Keempat, tidak terdapat laporan keuangan sesuai Kepmendesa PD TT Nomor 136 Tahun 2022 yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, neraca, arus kas, dan CALK, hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu pengurus BUMDes Ranggawulung sebagai berikut:

“Kita memang selama ini belum melakukan pembukuan keuangan, ya karena pemasukan yang kita dapat kadang-kadang kurang untuk memenuhi biaya operasional di sini, sampai kadang untuk membeli token listrik kita kas bon dulu dan ketika nanti dapat pemasukan kita tutup, jadi kita belum melakukan pembukuan keuangan karena memang seperti ini keadaanya.”(14 Mei 2024)

Beberapa permasalahan diatas menarik minat peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes Ranggawulung dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa Curugbitung dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama ilmu yang berkaitan dengan penelitian, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pengelola BUMDes, dan sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan 6 prinsip pengelolaan BUMDes menurut Joko Purnomo (2016:9) yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ranggawulung dalam Mengoptimalkan PAD Desa Curugbitung Kabupaten Lebak yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif yang dapat mendeskripsikan fenomena baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia, untuk mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,

kesamaan, dan perbedaannya terhadap fenomena lain. Dengan pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan realita yang bersumber dari informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Terdapat 6 informan dalam penelitian ini diantaranya Pengurus BUMDes Ranggawulung (K1), Pengurus Pokdarwis (U1), Pengawas BUMDes Ranggawulung (U2), Pemdes Curugbitung (U3), UMKM wisata Ranggawulung(T1), dan Masyarakat eks. BUMDes Ranggawulung (T2). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang diuji menggunakan trigulasi teknik dan triangulasi sumber untuk menilai keabsahan data. Analisis data menggunakan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:321) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, hasil penelitian Pengelolaan BUMDes Ranggawulung dalam mengoptimalkan PAD Desa Curugbitung dengan mengelola wisata alam Ranggawulung yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek yang sesuai dengan teori 6 prinsip pengelolaan BUMDes oleh Joko Purnomo (2016:9) yang peneliti gunakan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip yang telah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa prinsip yang belum dilaksanakan secara optimal dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung, berikut pembahasannya:

a. Kooperatif

Prinsip Kooperatif dalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usaha. Prinsip ini menjadi dasar dan jati diri pengelolaan BUMDes karena kerjasama atau gotong royong telah menjadi ciri khas atau budaya dari masyarakat desa sehingga melahirkan kerjasama diantara stakeholder.

Hasil penelitian menemukan beberapa fakta bahwa pengelolaan wisata Ranggawulung telah melibatkan beberapa komponen yang sudah cukup lengkap mulai dari Internal BUMDes Ranggawulung sebagai aktor utama, Pokdarwis Desa Curugbitung sebagai aktor pengembangan wisata, UMKM Desa Curugbitung, Pemerintah Desa Curugbitung sebagai pengawas dan penasihat, dan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui DPMD sebagai pendamping dan pembina pengelolaan BUMDes dan DISBUDPAR sebagai pendamping dan pembina pengelolaan wisata, dan komponen masyarakat Curugbitung. Lengkapnya stakeholder yang terlibat, maka akan berdampak baik untuk pengelolaan BUMDes Ranggawulung karena semakin luas jaringan yang terbentuk.

Namun hasil penelitian lebih dalam menyatakan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung meskipun tersebut bukan masalah yang signifikan. Disisi lain masyarakat sering tidak bersikap kooperatif, karena kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat Curugbitung hanya akan ramai saat persiapan tradisi Ngembang Keramat Cokel atau Haul Raden Tb. Kuncung Amarullah setiap 10 Muharram.

Temuan lain dari penelitian ini bahwa BUMDes Ranggawulung belum melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau investor manapun, bahkan hal ini belum diijinkan oleh pemerintah Desa Curugbitung karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah faktor SDM pada internal BUMDes. Prioritas kerja sama

BUMDes Ranggawulung saat ini adalah masyarakat Curugbitung atau kolaborasi dengan BUMDes dari desa lain.

b. Partisipatif

Prinsip partisipatif dalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Sehingga seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan serta mengembangkan BUMDes terutama anggota dan pengurus internal BUMDes, dengan partisipasi yang baik dari anggota BUMDes Ranggawulung maka akan berdampak baik terhadap jalannya usaha.

Hasil penelitian menemukan beberapa fakta bahwa partisipasi dari anggota Desa Ranggawulung cenderung menurun, karena awal pembukaan BUMDes memiliki 15 anggota namun saat penelitian dilakukan anggota BUMDes tersisa 5 orang. Hal ini disebabkan mayoritas anggota memilih bekerja di luar BUMDes dengan pendapatan yang lebih besar, sehingga BUMDes tidak dapat berjalan secara efektif.

Peneliti juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat Curugbitung khususnya bidang UMKM bahwa saat hari biasa, pedagang yang tetap berjualan hanya dua orang, yang memang lokasi cukup strategis dan menjadi pusat keramaian wisata. Namun pelaku UMKM terdapat peningkatan pada hari-hari tertentu seperti libur Nataru, libur lebaran, dan hari libur lainnya, atau adanya acara yang digelar di kawasan wisata Ranggawulung seperti acara perkemahan, manasik haji, atau acara lainnya.

Berdasarkan hal diatas dapat dinyatakan bahwa sikap profesional dan transaksional yang dimiliki anggota BUMDes dan pelaku UMKM berdampak pada menurunnya prinsip partisipatif dalam pengelolaan BUMDes.

c. Emansipatif

Prinsip emansipatif dalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Prinsip ini mengindikasikan bahwa BUMDes memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berkontribusi maupun mendapatkan akses informasi. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada masyarakat, sehingga BUMDes harus memegang nilai kehidupan dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi atas hal apapun kepada siapapun.

Hasil wawancara menemukan fakta bahwa dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung selalu memperlakukan anggotanya sama tanpa pandang bulu, prinsip emansipatif dapat dijalankan dengan baik karena seluruh anggota dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung merupakan warga asli Curugbitung yang memiliki latar belakang tidak jauh berbeda baik dari suku, golongan, dan agama. Masyarakat Curugbitung juga memiliki kesempatan yang sama untuk turut berkontribusi dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung. Pengunjung wisata Ranggawulung juga diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan, karena tiket yang dibayarkan pengunjung sama sehingga fasilitas yang didapat sama.

d. Transparan

Prinsip transparan dalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Penerapan prinsip transparansi penting bagi pengelolaan BUMDes, untuk membuat keselarasan informasi yang didapatkan oleh pengguna informasi seperti pihak pemerintah desa dan masyarakat umum. Salah satu penyebab sulit berkembangnya pengelolaan BUMDes adalah tidak jalannya prinsip

transparan, sehingga timbul rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan BUMDes dikalangan masyarakat. Hal ini dapat berdampak buruk karena bisa saja BUMDes sebagai lembaga sosial kehilangan kekuatan sosialnya.

Hasil wawancara menemukan fakta bahwa pengelola BUDesa Ranggawulung selalu terbuka atas segala informasi kepada Masyarakat Curugbitung terutama kepada pelaku UMKM

Temuan lain penelitian yaitu prinsip transparansi dalam mengelola keuangan belum dijalankan. Pengelola BUDes Ranggawulung tidak dapat melakukan transparansi keuangan kepada pengguna informasi sesuai ketentuan, mengingat keuangan pada sebuah organisasi sangat sensitif. Dokumen laporan keuangan yang dimiliki belum sesuai Kepmendesa PD TT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Laporan keuangan yang dimiliki BUMDes Ranggawulung hanya berupa laporan kas harian yang berisi laporan kas masuk dan kas keluar. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung, kurangnya SDM karena mundurnya beberapa anggota menyebabkan proses administrasi dan laporan keuangan tidak ada yang membidangi.

e. Akuntabel

Prinsip akuntabel dalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa seluruh kegiatan bisa dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban pada sebuah organisasi benar-benar berdasarkan kenyataan yang terjadi dan tidak ada yang ditutupi ataupun dimanipulasi. Akuntabilitas berarti menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab organisasi yang profesional atas keputusan atau kebijakan yang diambil. Pertanggungjawaban BUMDes sering dianggap sepele, padahal seluruh kegiatan yang

dilakukan harus memiliki dasar akuntabel sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan secara administratif.

Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa meskipun telah memiliki AD/ART, Renstra, dan RAB untuk rencana program kerja BUMDes namun dapat dinyatakan bahwa BUMDes Ranggawulung belum sepenuhnya melaksanakan prinsip akuntabilitas, dilihat dari laporan keuangan BUMDes Ranggawulung belum lengkap sesuai Kepmendesa PDPT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Laporan keuangan yang dimiliki BUMDes Ranggawulung hanya berbentuk laporan harian yang ditulis secara manual yang seharusnya mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, neraca, arus kas, dan CALK.

Saat penelitian dilakukan telah banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola laporan keuangan BUMDes secara mudah, efektif, dan efisien, akan tetapi hal ini belum dilakukan oleh pengelola BUMDes Ranggawulung. Namun berdasarkan pernyataan dari informan, secara perlahan BUMDes Ranggawulung sedang menyesuaikan aplikasi berbasis web dari BPKP yaitu Forsa-BUM Desa untuk pengelolaan laporan keuangan BUMDes agar tertib secara administrasi.

f. Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan pada pengelolaan BUMDes mengacu pada upaya untuk menjalankan operasi BUMDes dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari keberadaan BUMDes di kemudian hari. Program BUMDes harus direncanakan dan dipertimbangkan sejak awal pendirian sehingga program kerja yang akan dilaksanakan tetap dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Hasil penelitian menemukan fakta dalam mengelola wisata Ranggawulung selalu mengutamakan kelestarian lingkungan untuk menjaga dan merawat tanah adat yang diamanatkan kepada BUMDes, adanya rasa memiliki diantara pengelola dan masyarakat berdampak pada kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem di atas tanah adat yang dijadikan kawasan wisata alam Ranggawulung. Sebab, secara geografis wisata alam Ranggawulung menjadi gerbang timur wisata Kabupaten Lebak karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Luasnya area wisata sangat berpotensi untuk dijadikan objek wisata alam dan wisata buatan dengan menambahkan wahana modern seperti *flying fox*, *water boom*, dan *outbound arena*. Selain itu, Desa Curugbitung ternyata dari segi pertanian dan peternakan sangat potensial, bahkan batu mulia Kalimaya juga berasal dari Desa Curugbitung. Hal ini dapat menjadi modal BUMDes untuk berinovasi dan meningkatkan PADes secara maksimal.

Temuan lain terkait prinsip berkelanjutan adalah pengelola BUMDes Ranggawulung belum melakukan promosi wisata secara maksimal terutama promosi secara *online*. Hasil observasi menemukan bahwa akun Instagram yang bernama *@wisataalamranggawulung* tidak aktif mempromosikan dan memberikan informasi tentang objek wisatanya, terlihat dari jarak antar postingan memiliki tenggang waktu yang sangat lama, unggahan di You Tube yang dilakukan para konten kreator yang datang berkunjung ke wisata juga tidak melakukannya secara berkala.

SIMPULAN

Hasil penelitian dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ranggawulung dalam mengoptimalkan PAD Desa Curugbitung Kabupaten Lebak menggunakan enam prinsip pengelolaan BUMDes menurut Joko Purnomo (2016:9) menyatakan belum diterapkan sepenuhnya, sehingga masih banyak ruang yang perlu diperbaiki lebih lanjut. BUMDes

Ranggawulung telah menerapkan prinsip Kooperatif dengan melibatkan berbagai pihak mulai pemerintah Kabupaten Lebak hingga masyarakat Curugbitung. Perlakuan kepada anggota, masyarakat, hingga pengunjung telah dilakukan sesuai prinsip emansipatif. Namun tidak adanya dokumen laporan keuangan yang lengkap menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pengguna informasi dan meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan BUMDes. Kurangnya partisipasi anggota BUMDes dan masyarakat Curugbitung dalam mengelola BUMDes menjadi kurang maksimalnya pelaksanaan prinsip partisipatif, meskipun pengelola telah memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengetahui potensi yang dimiliki Desa Curugbitung, namun pengelola belum mengoptimalkan promosi terutama secara digital melalui berbagai kanal media sosial maupun web secara masif dan efisien. Meskipun masih memiliki banyak sisi yang perlu diperbaiki, pengelola BUMDes Ranggawulung tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengembangan dan upaya meningkatkan standar tinggi dalam pengelolaan BUMDes Ranggawulung.

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran mengenai Pengelolaan BUM Desa Ranggawulung, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki BUM Desa Ranggawulung sehingga dalam pengelolaan BUM Desa Ranggawulung diharapkan dapat berdampak positif bagi wisata Ranggawulung, Desa Curugbitung, dan masyarakat Curugbitung. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengoptimalkan pendapatan BUM Desa dan PADes Curugbitung, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Curugbitung.

Pertama, Direktur BUM Desa Ranggawulung perlu segera melakukan restrukturisasi organisasi terutama merekrut anggota muda yang memiliki komitmen dan kapasitas sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota BUM Desa Ranggawulung, hal ini perlu dilakukan karena terdapat

beberapa posisi struktural yang kosong ditinggalkan anggota sebelumnya, sehingga adanya restrukturisasi dapat mengisi posisi tersebut guna meningkatkan kinerja BUM Desa Ranggawulung.

Kedua, perlu adanya dokumentasi laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Kepmendesa PD TT Nomor 136 Tahun 2022 yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Pengelola BUM Des juga perlu melakukan *coaching clinic* terkait aplikasi Forsa-BUM Desa dari BPKP kepada anggota untuk memenuhi standar pengelolaan keuangan BUMDes. Sebagai pengguna anggaran negara, BUMDes harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan tersebut, dan sebagai lembaga sosial BUMDes perlu dukungan dan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Ketiga, BUM Desa Ranggawulung perlu melakukan promosi wisata baik secara langsung maupun melalui kanal digital (Tiktok, Instagram, Facebook Youtube, Web, dll.) secara masif, karena promosi wisata berperan besar untuk memperkenalkan wisata, menarik perhatian wisatawan secara efisien dan memastikan prinsip berkelanjutan pada sektor wisata. Mengingat potensi Desa Curugbitung baik dari letak geografis ataupun kekayaan alam berpeluang besar untuk dimaksimalkan menjadi desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.
- Purnomo, J. (2016). *PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)*. dikutip dari https://issuu.com/infest/docs/4_bumdesa
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Suparno. (2023). Penting! Ini Dia Sumber-sumber Anggaran Desa.

WEBSITE RESMI DESA DERO. Link :

<https://dero.desa.id/artikel/2023/4/3/penting-ini-dia-sumber-sumber-anggaran-desa#:~:text=Perppu>, diakses 16 Mei 2024

UTS Berita. (2022). Model Desain Peningkatan Pendapatan Asli Desa

(PADesa). *UTSBerita*. Link : [https://uts.ac.id/2022/07/19/model-](https://uts.ac.id/2022/07/19/model-desain-peningkatan-pendapatan-asli-desa-padesa/)

[desain-peningkatan-pendapatan-asli-desa-padesa/](https://uts.ac.id/2022/07/19/model-desain-peningkatan-pendapatan-asli-desa-padesa/), diakses 16 Mei 2024

Widjaja, H. (2010). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan*

Utuh (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.